

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2010
TENTANG KETERTIBAN UMUM
(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak)**

Oleh:

Ahmad Hamdan Bastomi^{1*}

NIM :E1011161088

Sri Maryuni,², Rasidar²

*Email:ahmadbastomi98@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung pura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung pura Pontianak.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di atas area Waterfront. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi melalui Pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Mazmanian dan Sabatier (2006) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas Waterfront, kurang tegasnya petugas terkait dalam menerapkan aturan tersebut. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran dari peneliti yaitu Dinas dan Kelurahan harus terus memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dalam setiap waktu dan kesempatan, memberikan sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera, meningkatkan pengawasan dilapangan secara berkala dan menyediakan lokasi yang strategis untuk pedagang kaki lima agar tertib dalam berjualan.

Kata kunci : Implementasi, Ketertiban Umum, Waterfront Kota pontianak.

**LOCAL REGULATION IMPLEMENTATION NUMBER 1 OF 2010
ON PUBLIC ORDER
(Study on Street Vendors at Pontianak City Waterfront)**

By:

Ahmad Hamdan Bastomi^{1*}

NIM :E1011161088

Maryuni², Rasidar²

*Email:ahmadbastomi98@student.untan.ac.id

1. A Student of Administration Public Study Program in Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturers of Administration Public Study Program in Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out and reveal affecting factors in succeeding Local Regulation Implementation Number 1 of 2010 on Public Order (Study on Street Vendors at Pontianak City Waterfront). The problem in this research was that there were many street vendors selling things at waterfront area. This research used descriptive method using observation, interviews and documentation as data collection techniques through qualitative approach. Mazmanian and Sabatier (2006) theory was used in this research which was based on the variables affecting policy implementation, such as: problem characteristic, policy characteristic, and policy environment. The result showed that the policy was not run well because there were still many street vendors sell things at the area, and lack of socialization related to this policy. Besides, the social and economic situations of the people affected the implementation of this policy. The researcher's recommendation is that the related Government Office and Sub-district must continue to give socialization to the street vendors in every opportunities, to give stricted sanction to emerge shock effect, to increase supervision regularly and to provide strategic location for the street vendors in order to have good public order.

Keywords: Implementation, Public Order, Pontianak City Waterfront



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sungai Kapuas merupakan sebuah fenomena alam yang sudah menjadi ikon bagi Kota Pontianak dimana kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat maupun luar daerah. Kota Pontianak tumbuh dari keberadaan sungai sebagai sumber kehidupan kota dan telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan pada pola ruang kotanya dan akan terus berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan fasilitas kota yang lebih modern.

Hingga saat ini, keberadaan Sungai Kapuas tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Pontianak sehingga sebuah ruang publik yakni Waterfront dibangun dan merupakan bentuk apresiasi nyata terhadap kekayaan alam kota Pontianak. Pemerintah akan merevitalisasi kawasan tepian sungai agar dapat dijadikan sebagai Kota Air (*Waterfront City*) guna menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara

untuk berwisata ke Kota Pontianak. Rentang kawasan pembangunan proyek *Waterfront City* akan membentangi beberapa kawasan antara lain pemukiman, perdagangan, cagar budaya dan kawasan wisata Taman Alun Kapuas. Selain itu kawasan pelabuhan dan peti kemas, pemukiman warga dan nelayan, serta kawasan pabrik juga dalam lingkup pembangunan kawasan *Waterfront City*.

Rencana pemerintah merupakan pembangunan area *waterfront* sepanjang 20 kilometer mulai dari batas kota di wilayah barat sampai batas kota di wilayah timur dimana pembangunan dilakukan di dua sisi pinggir Sungai Kapuas. Pengertian dari *waterfront* adalah bagian dari kota yang berbatasan dengan sungai, laut atau danau yang berfungsi sebagai ruang publik yang mewadahi kegiatan rekreatif publik. Salah satu urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah masalah Ketertiban Umum.

Tujuan dari pelaksanaan urusan tersebut adalah menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan

keindahan, maka diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana di daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum di Kota Pontianak berisi hal-hal yang mengatur ketertiban di masyarakat. Pada penelitian ini peneliti secara khusus membahas Bab IV (4) tentang tertib bangunan dan usaha dalam Perda No. 1 Tahun 2010 yang berisi tentang larangan dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam mendirikan suatu bangunan dan atau mendirikan suatu usaha, yang berbunyi :

1. Pasal 20 (c)

Mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, parit, saluran

pembuangan air dipinggir jalan dan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitassosial , fasilitas umum untuk berjualan /berdagang.

2. Pasal 20 (d)

Meletakkan atau menumpuk barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya diatas trotoar, dipinggir jalan dan atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan atau keperluan lainnya.

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Salah satu masalah yang penulis lihat adalah masalah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) pada kawasan Waterfront. Dengan adanya Undang-undang Perda No 1 Tahun 2010, diharapkan Pemerintah Kota Pontianak dapat mengatur keberadaan PKL di sekitar Waterfront City, karena

pedagang-pedagang kaki lima yang hanya meletakkan barang dagangan di gelaran tikar, gerobak serta kursi dan meja sehingga hal tersebut menyebabkan area tersebut menjadi tidak rapi dan terganggunya area pejalan kaki bagi pengunjung. Demi tata ruang yang rapi, pedagang-pedagang tersebut harus diberikan sebuah tempat khusus menjalankan aktivitas perdagangan mereka.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Kurangnya akses jalan pengunjung sehingga membuat sempit pejalan kaki karena banyaknya Pedagang Kaki Lima.
2. Masih ada Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tentang larangan untuk berdagang di sekitar Waterfront.

3. Fokus Penelitian

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dan juga mengacu pada latar belakang, maka

penelitian ini memfokuskan pada “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum mengenai Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya masalah diatas, maka penulis menganggap penting merumuskan permasalahan yang menjadi bahan penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum mengenai Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak ?”

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum mengenai Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak, seperti : Institusi Pendidikan dan Instansi Terkait.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan untuk lebih mendalami serta memberikan manfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum mengenai Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam melakukan pelaksanaan yang tepat bagi DISPERINDAG dan Kelurahan Benua Melayu Laut untuk mengatasi ketertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Menurut H. Hugh Heglo (dalam Abidin 2004:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson (dalam Islamy, 1997:4) mendefinisikan. kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

b. Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public* (dalam Agustino 2006:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau

sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2006), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;

1. Karakteristik Masalah
2. Karakteristik Kebijakan
3. Lingkungan Kebijakan

2. Alur Pikir Penelitian

Judul

Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak)



Identifikasi Masalah

1. Kurangnya akses jalan pengunjung sehingga membuat sempit pejalan kaki karena banyaknya Pedagang Kaki Lima

2. Masih ada pedagang kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tentang larangan untuk berdagang di sekitar Waterfront.



Teori

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2006), Ada 3 kelompok yang Mempengaruhi keberhasilan implementasi :

1. Karakteristik masalah
2. Karakteristik kebijakan
3. Lingkungan kebijakan



Output

Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian deskriptif adalah cara menggambarkan atau melukiskan gejala berdasarkan data dan fakta secara aktual.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pontianak dan Kelurahan Benua Melayu Laut. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021 hingga April 2021.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pontianak.
2. Kelurahan Benua Melayu Laut.

3. Tiga Orang Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak.

4. Dua Orang Wisatawan atau Pengunjung di Waterfront Kota Pontianak.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak), yang mencakup berbagai hal dalam permasalahan ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data di lapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2018: 334) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada.

D. HASIL PENELITIAN

Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut teori Mazmanian dan Sabatier (2006), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik Masalah

a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Mengacu pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 yang berisi tentang larangan dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam mendirikan suatu bangunan dan atau mendirikan suatu usaha. Secara teknis masih banyak pedagang kaki lima yang belum mematuhi peraturan tersebut ini merupakan permasalahan yang cukup menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah maupun masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan ungkapan Y selau Kepala Bidang Pasar di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pontianak dan Z selaku Sekertaris Kelurahan Benua Melayu Laut mengungkapkan bahwa dalam

mengatasi masalah ketertiban pedagang kaki lima di Waterfront Dinas sudah cukup aktif dalam memberikan edukasi melalui penyuluhan dan bekerjasama dengan pihak Kelurahan Benua Melayu Laut walaupun masih ada pedagang kaki lima yang masih berjualan di area Waterfront demi kelangsungan hidup mereka.

b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran

Suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen maka implementasi program ini akan lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda. Dari hasil wawancara yang diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan tingkat pendidikan. Hal ini tentu mempengaruhi implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di Waterfront Kecamatan Pontianak Selatan, karena

dengan beragam suku bangsa dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan ketertiban umum pedagang kaki lima juga akan berbeda.

2. Karakteristik Kebijakan

a) Kejelasan isi kebijakan

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan ungkapan “Y” selaku Kepala Bidang Pasar dan “Z” selaku Sekertaris Kelurahan Benua Melayu Laut .dari hasil wawancara dalam memberikan penyampaian informasi tentang aturan yang ada kepada pedagang kaki lima dilakukan melalui surat menyurat/mengedarkan surat dan kelurahan yang mana pihak kelurahan sekaligus pengawas langsung dilapangan.

b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Dari hasil wawancara yang diketahui dukungan teoritis untuk kebijakan ini sudah cukup baik, namun dalam penerapan dilapangan hal ini belum berjalan dengan baik. Lingkungan sosial dan masyarakat pedagang kaki lima belum menjalankan peraturan yang ada walaupun mereka sudah tau adanya kebijakan ini.

3. Lingkungan Kebijakan

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

Pada hakekatnya lingkungan merupakan tempat tinggal dimana semua aktivitas berlangsung. Dalam konteks ini lingkungan merupakan salah satu hal yang perlu di perhatikan. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Benua Melayu Laut, Ibu Z, beliau mengatakan bahwa :

"mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan

teknologi menurut saya masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut sudah cukup lumayan maju walaupun rata-rata masih menengah, secara sosial masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut terdiri dari beragam etnis dan agama, yang selama ini cukup kondusif, mengenai kemajuan teknologi masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut juga sudah cukup maju, karena disini terdapat beberapa pusat pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir"

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan cukup kondusif dengan beragam etnis dan agama, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut rata-rata sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut sudah termasuk lumayan maju dalam hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa pusat pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir.

b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan

Dukungan publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat di butuhkan adanya sentuhan dukungan dari masyarakat. Peneliti mencoba mewawancarai Bapak “Y” selaku Kepala Bidang Pasar dengan menanyakan apakah ada tanggapan dan dukungan yang diberikan masyarakat pedagang kaki lima dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang diberikan, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada sih mereka memberikan tanggapann mengenai aturan ini, dukungan yang diberikan sih ya mereka mengikuti aturan yang diberikan walaupun tetap saja mereka masih berjualan di area tersebut dan berdalih akan mejaga kebersihan dan kerapian”.

Peneliti mencoba menguatkan lagi pendapat diatas dengan mewawancarai Ibu “Z” selaku Sekertaris Kelurahan

Benua Melayu Laut mengatakan bahwa :

“Selama ini belum ada tanggapan dari para pedagang yang penting mereka tertib mengikuti aturan dan tidak boleh melakukan penambahan lagi di area itu”.

Dari hasil wawancara diatas secara argumen pedagang kaki lima tidak memberikan tanggapan apapun mengenai kebijan ini. Pedagang kaki lima di Waterfront ini mereka sudah cukup mengikuti aturan dengan tidak ada lagi penambahan jumlah pedagang di sekitar Waterfront karena fasilitas publik. Dalam hal ini kesadaran masyarakat pedagang kaki lima yang perlu kita tegaskan lagi untuk saling mendukung segala peraturan yang ada demi kebaikan bersama dan kenyamanan pengunjung yang berakibat pada perekonomian masyarakat juga.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan hasil analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan dilapangan dengan

memperhatikan tujuan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak) berikut peneliti uraikan kesimpulan dari hasil pembahasan :

1. Karakteristik masalah ketertiban umum pedagang kaki lima di Kelurahan Benua Melayu Laut yaitu kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima dalam mengikuti peraturan yang ada dan masih berjualan di area fasilitas umum yaitu di Waterfront. Para pedagang sudah tau tentang peraturan tersebut namun mereka masih tetap berjualan karena tuntutan ekonomi. Masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai etnis, agama dan tingkat pendidikan. Hal ini tentu mempengaruhi implementasi kebijakan ketertiban umum di Kelurahan Benua Melayu Laut, karena dengan beragam etnis, agama dan tingkat pendidikan masyarakat maka

pemahaman dalam kebijakan ini juga akan berbeda.

2. Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum pedagang kaki lima di Waterfront sudah sangat jelas, karena selain perda tentang aturan tersebut pihak kelurahan juga mengeluarkan surat edaran kepada warganya mengenai aturan kebijakan yang terkait. Kejelasan isi kebijakan tentang ketertiban umum sudah cukup jelas bagi para pedagang. Sehingga selanjutnya tergantung individu masing-masing apakah mereka mematuhi kebijakan ini atau tidak. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 memiliki dukungan teoritis yang cukup kuat, yang menjadi dasar di terbitkannya perda ini untuk mengatur ketertiban umum di wilayah sekitar Waterfront.

3. Kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Benua Melayu Laut cukup kondusif dengan beragam etnis dan budaya, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi sudah termasuk maju dalam

hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa pusat pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, berikut peeliti uraikan saran-saran dalam menyikapi hasil penelitian :

1. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib bangunan dan usaha agar terus disampaikan ke masyarakat dalam setiap waktu dan kesempatan.
2. Penegakkan hukum harus dipertegas dengan pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib bangunan dan usaha di wilayah Waterfront Kota Pontianak.
3. Perlunya ditingkatkan pengawasan dilapangan secara berkala agar Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban

Umum khususnya mengenai tertib bangunan dan usaha dapan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Diharapkan bagi peran Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Umkm Kota Pontianak dan Kelurahan Benua Melayu Laut untuk dapat menyediakan lokasi yang strategis untuk pedagang kaki lima di Waterfront agar tetap tertib dalam berjualan.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

- Abdulah Wahab, Solicshin .1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Pancur Siwah.
- Agustino. L, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agustino. Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijalcan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

George Edward III, 1980 , Teori Implementasi kebijakan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, LExy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Offset

Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Tachjan.2006. *Implementasi Kebijalm Publik*. Bandung: AIPI.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparans Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps Penerbit.

2. Dokumen

Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum di Kota Pontianak

Perda No. 1 Tahun 2010 yang berisi tentang larangan dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam mendirikan suatu bangunan dan atau mendirikan suatu usaha

3. Referensi Jurnal Skripsi

Ariska Endah Chayani, 2018. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Taman Kuliner Wonosari)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ristianto Padilah, 2017. Skripsi dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara”. Universitas Tanjungpura

